

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: TANTANGAN MENUJU PARADIGMA BARU PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL PANCASILA (TINJAUAN FILOSOFIS-PEDAGOGIS)

Prof. Dr. Udin S.Winataputra, M.A.

E-mail: udin@ut.ac.id; udin.winata@yahoo.com

Guru Besar FKIP dan Program Pascasarjana UT, Ketua Umum Asosiasi Profesi PPKn,
Ketua III Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Member NCSS, USA

ABSTRAK

Untuk mewujudkan komitmen nasional guna memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" sesuai Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003, diperlukan wahana psiko-pedagogis (pengembangan potensi peserta didik di sekolah) dan sosio-andragogis (fasilitasi pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan terjadinya proses belajar berkehidupan Pancasila sepanjang hayat melalui pendidikan kewarganegaraan.

PANCASILA SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN PKN DI INDONESIA

Dr. Winarno, SPd., M.Si.
Prodi PPKn FKIP UNS Surakarta
Alamat koresp: winarno_uns@yahoo.co.id

ABSTRACT

Based on experience in the implementation of civic education curricular dimension, Pancasila has always been a subject matter. In 2006 Civics curriculum, materials Pancasila also published as a scope or study. The question being answered is how the material is organized in Civic Education 2006 and what the interpretation of Pancasila which used material. The results of the study concluded that the description of the Pancasila in Civic Education further developed according to structural sequences that are developing the scientific description of Pancasila as the state ideology and state basic. Interpretation or explanation given above each Pancasila includes sociological, philosophical, ideological nationalism and judicial interpretation. It is recommended that the preparation of the material in Civic Education is done by considering the truth of scientific thinking to meet and consider the political thought of Pancasila in order that civic education material that is "the great ought", the same and to unite.

Keywords: Pancasila, Civic Education

***CIVIC EDUCATION* SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *LAW-RELATED EDUCATION* UNTUK PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWA**

Triana Rejekiningsih, SH, KN, MPd.

Dosen Prodi PPKn FKIP UNS

ABSTRAK

Pendidikan menjadi salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menguatkan karakter bangsa berdasar nilai-nilai jati diri bangsa. Pendidikan yang bertujuan meningkatkan partisipasi warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional adalah civic education (pendidikan kewarganegaraan). Model pembelajaran dalam PKn yang dapat dianggap memadai untuk pembentukan karakter warga negara agar memiliki kesadaran hukum, baik dari aspek civic knowledge, civic skills, maupun civic dispositions adalah model Law-Related Education (LRE). Pembelajaran dengan menggunakan LRE akan terjadi interaksi ekstensif di antara para siswa, salah satunya dengan menghadirkan situasi materi pembelajaran dengan kasus-kasus, kegiatan bermain peran, simulasi peradilan (mock trial), simulasi Legislative Hearing, dan Town Meetings (Rapat/Musyawarah Kota) untuk membuat suatu program perencanaan pembangunan di suatu kota atau daerah. Karakter sadar hukum akan terbentuk melalui proses pendidikan yang terencana dengan menerapkan LRE yang mampu mengintegrasikan prinsip pembelajaran kesadaran hukum untuk warga negara. Melalui model pembelajaran Law-Related Education (LRE), pembelajaran kesadaran hukum tidak akan dimaknai sebagai pembelajaran yang hanya menekankan pengetahuan saja namun mampu menghubungkan antara unsur pengetahuan hukum, keterampilan hukum dan sikap/perilaku hukum. Pembentukan karakter sadar hukum membutuhkan proses yang simultan dan berkesinambungan, melalui pendidikan kewarganegaraan karakter kewarganegaraan yang sadar hukum dapat dikembangkan sesuai nilai-nilai kebajikan yang bermuara pada jati diri bangsa. Hal ini merupakan upaya menyiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dengan bekal pendidikan kewarganegaraan diharapkan setiap warga negara memiliki kemampuan untuk dapat melakukan aktivitasnya sebagai warga negara yang sadar hukum.

EVALUASI PROGRAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH

(Sebuah Pendekatan Michael Scriven)

Anita Trisiana, SPd, MH.

Prodi PPKn FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta

E-mail: anita trisiana@yahoo.co.id

ABSTRAK

Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentunya tidak hanya berpusat pada aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif dan psikomotorik merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipungkiri oleh seorang guru dalam melakukan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Hal ini sejalan dengan adanya pengembangan nilai-nilai karakter bangsa yang merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Nilai tersebut perlu ditumbuhkembangkan peserta didik yang pada akhirnya akan menjadi cerminan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran yang besar dalam pengembangan pendidikan karakter karena peran sekolah sebagai pusat pembudayaan melalui pendidikan pengembangan budaya sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu memunculkan paradigm baru, sehingga hambatan yang muncul sebagai bagian dari permasalahan implementasi kebijakan tidak menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata ajar yang mandul akan internalisasi nilai – nilai yang seharusnya dapat dimunculkan sebagai bagian dari adanya perubahan paradigma baru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.

KAJIAN HAK WARGA MISKIN DALAM KONTEKS PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN LOKAL

Wijianto, SPd., MSc.

Drs. Machmud Al Rasyid, SH. MSi.

Dra. Ch Baroroh, MSi.

Email: wijianto_uns@yahoo.co.id

HP. 081 667 53 77

ABSTRAK

Studi ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik masyarakat miskin, permasalahan kemiskinan, data kelembagaan lokal dan potensi pemberdayaannya. Studi dilaksanakan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengambilan sampel secara purposive. Sumber datanya Informan, peristiwa, dokumen, dan kepustakaan yang relevan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, FGD, observasi, dan studi dokumen. Validitas menggunakan triangulasi sumber dan metode, analisis dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan model analisis interaktif mengalir. Hasil studi menunjukkan bahwa Wilayah Karangpatihan 30% nya adalah hutan kering, 20% tegalan dan 12 % sawah tadah hujan. Infra struktur masih kurang terutama sumur untuk pertanian dan peternakan, sarana kesehatan kurang sehingga akses masyarakat terhadap kesehatan belum memadai, transportasi umum susah. Sarana prasarana pendidikan umum, tempat ibadah memadai (4 SD Negeri, 27 Masjid dan mushola) ,tetapi akses warga yang berkebutuhan khusus tidak ada, sehingga mereka tidak bersekolah. Penduduk Karangpatihan berjumlah 5434 jiwa, Jumlah KK Miskin (kuning) 11 %, KK sangat miskin (merah) 12 %, dan jumlah KK sangat miskin dan mengalami keterbelakangan mental 2 % atau 110 jiwa, mereka tidak bermata pencaharian dan hanya bergantung pada pihak lain. Permasalahannya mata pencaharian penduduk sebagian besar buruh tani disusul petani. Sebagian besar warga merupakan SDM rendah, hanya bisa bercocok tanam sekali satu tahun dengan penghasilan rendah, pagu raskin kurang memadai, dan terjadi penggundulan hutan karena kemiskinan. Terdapat kelembagaan lokal, yaitu: Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, tokoh masyarakat, kompak maju, kelompok pengajian, Karangpatihan Bangkit. Kendalanya SDM yang belum bagus, dukungan pemerintah daerah dan pusat kurang. Jumlah SDM memadai, lahan pertanian cukup untuk peternakan, potensi pemberdayakan melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal berupa pelatihan keterampilan beternak lele dan permodalan. Kondisi ketahanan sosial agak lemah ditandai dengan rendahnya kemampuan komunitas melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhinya; kurang mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan.

Kata kata kunci: Strategi, hak, miskin, ketahanan sosial

Seminar Nasional dan Kongres Asosisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) DPW Jateng bertema “Paradigma Baru Civic Education di Sekolah” di Surakarta 01 Desember 2012.

APLIKASI MODEL PAKAR DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI MEDIA MUSIK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN KARAKTER BANGSA BAGI SISWA

Arif Kriswahyudi

SMA Negeri 1 Pabelan Kabupaten Semarang

ABSTRAK

Permasalahan yang sering muncul dari siswa pada umumnya berhubungan dengan materi-materi yang bersifat abstrak di hampir semua mata pelajaran sehingga siswa kurang bersemangat dan termotivasi di dalam mengikuti pembelajaran. Melalui pembelajaran dengan menggunakan model PAKAR (Pembelajaran Adaptif, Kooperatif, Aktif, Reflektif), permasalahan ini diupayakan untuk diperbaiki. Pembelajaran dengan model PAKAR digunakan sebagai upaya untuk peningkatan hasil belajar dan karakter bangsa bagi siswa, siswa dapat mempelajari materi, menemukan materi, berdiskusi tentang relevansi materi yang dipelajari, merangkum, menyimpulkan, dan menyajikan dalam bentuk presentasi di kelas menggunakan media musik. Penelitian ini bertujuan untuk membantu mengoptimalkan hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Jenis penelitian merupakan penelitian tindakan kelas pada siswa kelas XII IPA Semester 1 di SMA Negeri 1 Pabelan Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2012/2013. Setelah dilakukan penelitian selama 2 (dua) siklus, diperoleh hasil pasti bahwa hasil belajar dan karakter bangsa pada mata pelajaran PKn secara bertahap mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari kondisi awal pada saat pembelajaran yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah, tanya jawab, diskusi kecil), diperoleh hasil belajar sebelum tindakan dilaksanakan dengan persentase siswa yang sudah tuntas hanya 40,74%, tetapi setelah menggunakan model PAKAR, perolehan nilai siswa semakin meningkat yaitu 51,86% siswa yang sudah tuntas pada siklus I kemudian menjadi 85,19% siswa yang sudah tuntas pada siklus II. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil pembelajaran PKn sebesar 44,45% dari kondisi awal 40,74% menjadi 85,19% pada akhir siklus II.

Kata kunci: model PAKAR, media musik, hasil belajar dan karakter bangsa.